



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
NATUNA



PEMERINTAH
DIGITAL
Birokrasi Berda

DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, serta penilaian kunjungan (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



EVALUASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

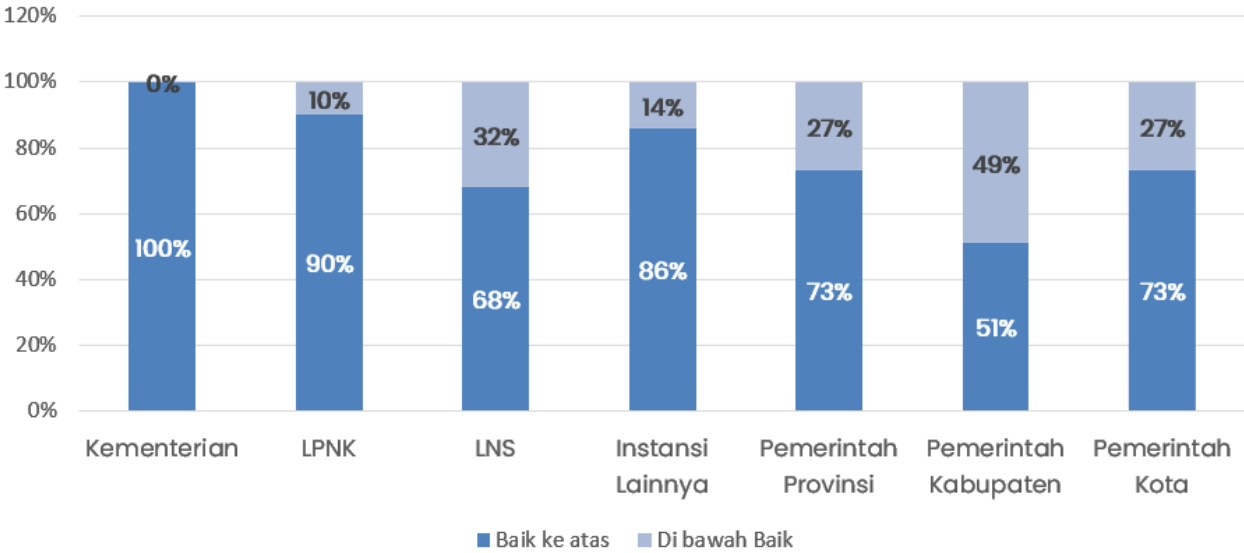
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 – Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik ^{*)}</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik ^{*)}																	
4	1,8 – < 2,6		Cukup																	
5	< 1,8		Kurang																	
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 – Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 – Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 – Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 – Layanan Publik	18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

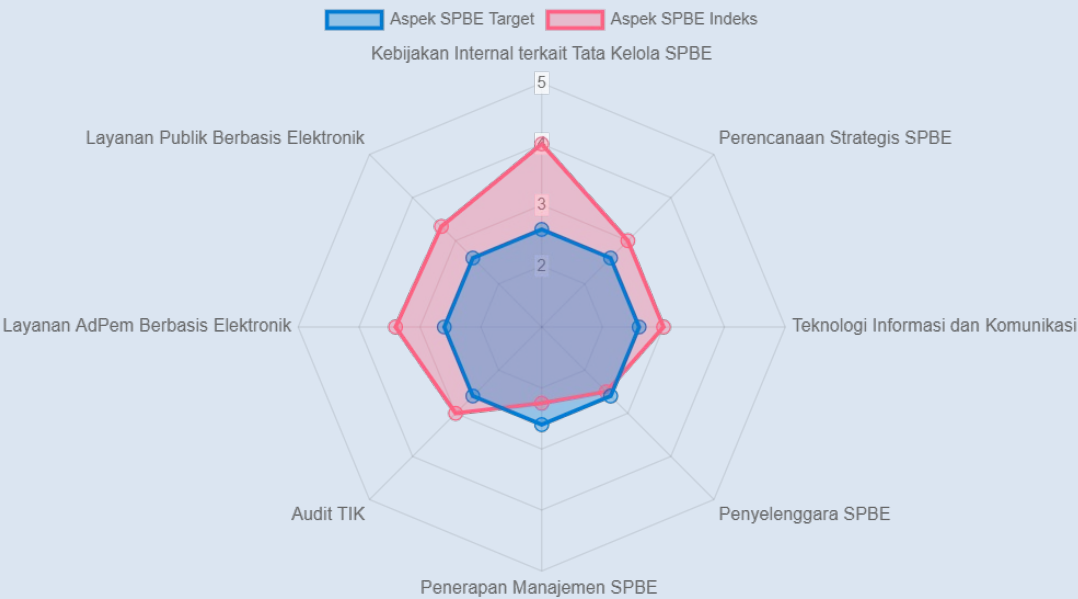
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,19
Domain Kebijakan SPBE	4,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,90
Perencanaan Strategis SPBE	3,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,00
Penyelenggara SPBE	2,50
Domain Manajemen SPBE	2,45
Penerapan Manajemen SPBE	2,25
Audit TIK	3,00
Domain Layanan SPBE	3,37
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,40
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Belum ada indikator Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang mendapatkan nilai maksimal karena belum ada dokumen perbaikan.

- **Kekuatan**
Peningkatan nilai signifikan menunjukkan komitmen untuk terus melakukan perbaikan pelaksanaan SPBE.
- **Kelemahan**
kelemahan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE belum ada roadmap review dan perbaikan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Belum ada Aspek Perencanaan Strategis yang mendapatkan nilai maksimal. Meskipun demikian sudah cukup bagus karena rata-rata mendapatkan nilai 3.

- **Kekuatan**
Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Natuna ada pada kemampuannya untuk berkembang sehingga bisa mendapatkan peningkatan nilai hampir pada seluruh indikator di Aspek Perencanaan Strategis.
- **Kelemahan**
Kelemahan Aspek Perencanaan Strategis yang dialami Kabupaten Natuna karena belum menunjukkan adanya review dan perbaikan sesuai hasil review.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum menunjukkan capaian yang memuaskan.

- **Kekuatan**
Belum ada kekuatan pada Aspek Teknologi Informasi.
- **Kelemahan**
Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum direncanakan dengan baik, terbukti dari banyaknya proyek yang tidak memiliki dokumen perencanaan, sehingga tampak kurang terkoordinasi. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga belum menjalani proses evaluasi yang komprehensif.

D. Penyelenggara SPBE

Aspek Penyelenggara SPBE hamper mendapatkan nilai maksimal yaitu 4.

- **Kekuatan**
Surat Keputusan (SK) untuk Tim Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah disiapkan secara lengkap. Dokumen ini mencakup rincian tentang komposisi tim, bersama dengan deskripsi yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota tim.
- **Kelemahan**
Belum terlihat adanya langkah-langkah perbaikan atau kemajuan yang signifikan dalam aspek Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

E. Penerapan Manajemen SPBE

Aspek Penerapan Manajemen SPBE nilainya sangat bervariasi antara 2 sampai dengan 3.

- **Kekuatan**
Kabupaten Natuna belum menunjukkan adanya kekuatan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE.
- **Kelemahan**
Kelemahan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE terutama karena pada setiap indikator tidak ditemukan dokumen perencanaan.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Aspek Audit TIK belum ada yang mendapatkan nilai maksimal.

- **Kekuatan**
Kabupaten Natuna belum menunjukkan adanya kekuatan pada Aspek Audit TIK.
- **Kelemahan**
Kelemahan pada Aspek Audit TIK terutama karena pada setiap indikator tidak ditemukan dokumen perencanaan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Natuna, nilainya rata-rata 3.

- Kekuatan
Kabupaten Natuna menggunakan penggunaan aplikasi berbagi pakai.
- Kelemahan
Pada aspek ini juga perlu aplikasi pelengkap yang memungkinkan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Aspek Layanan Publik Berbasis nilainya rata-rata 3.

- Kekuatan
Kabupaten Natuna menggunakan penggunaan aplikasi berbagi pakai.
- Kelemahan
Kelemahan pada aspek layanan publik berbasis elektronik kurangnya rencana review dan perbaikan.

REKOMENDASI

Evaluasi SPBE bergantung pada dokumen pendukung, sehingga keberadaan dan relevansi dokumen tersebut dengan situasi aktual dapat meningkatkan nilai evaluasi. Secara keseluruhan, implementasi SPBE di Kabupaten Natuna sudah cukup bagus, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Kabupaten Natuna menonjol dalam aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai dengan aturan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari penerapan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan pedoman nasional tentang SPBE, yang memastikan bahwa proses administrasi dan layanan publik berjalan secara digital, transparan, dan efisien. Kabupaten Natuna menghadapi kekurangan dalam aspek Penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama ketika dikaitkan dengan aturan pemerintah Republik Indonesia mengenai pelaksanaan SPBE. Kendala ini terlihat dalam kurangnya integrasi dan standarisasi sistem sesuai dengan pedoman nasional, yang berakibat pada efisiensi dan efektivitas operasional yang belum optimal. Mengingat evaluasi SPBE sangat bergantung pada dokumen pendukung, penting bagi Kabupaten Natuna untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut yang secara akurat menggambarkan pelaksanaan SPBE, termasuk kelengkapan dan pengesahan dokumen. Sebagai solusi, disarankan agar Kabupaten Natuna mengembangkan sistem repositori untuk menyimpan seluruh dokumen secara historis, yang memudahkan pencarian kembali dokumen tersebut saat diperlukan.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3